

Pengaruh Tekanan Pemangku Kepentingan dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Kualitas Laporan Keberlanjutan

Jenis Sesi Paper: Full paper

Astrid Rudyanto
STIE Trisakti
astrid@stietrisakti.ac.id

Sylvia Veronica NPS
Universitas Indonesia
Sylvia.vnps@gmail.com

Abstract:

The purpose of this research is to examine the effect of stakeholder pressure and corporate governance on quality of sustainability report. This research uses environment, employee, consumer, and shareholder as stakeholder while board of commissioner effectiveness and family ownership are used as corporate governance component. This research uses multiple regression method with purposive sampling method resulting in 123 firms listed on Indonesia Stock Exchange in 2010-2014 as sample. The result of this research is companies which get pressure from environment or consumer have higher quality of sustainability report than other firms. Pressure from employee positively affects quality of sustainability report. Meanwhile, pressure from shareholder has no effect on quality of sustainability report. Board of commissioner effectiveness positively affects quality of sustainability report and family ownership has no effect on quality of sustainability report. The implication of this research is for the company and for regulators. For companies, this study shows that the number of employees negatively affect corporate sustainability report. Employee turnover is the most widely disclosed items in GRI G4 version of sustainability reports. Therefore, companies should disclose items related to the environment and the product more because the results showed that companies that are environmentally-sensitive and companies that are close to the end consumer have better sustainability report quality. For regulators, this study shows that the effectiveness of the board of directors affect corporate sustainability report quality positively. Therefore, the regulator is expected to tighten supervision of the implementation of the regulation related to board of commissioners. For instance, this research finds that there is a company that owns the proportion of independent board below 30%. In addition, the results showed that difference in sustainability report quality is due to differences in pressure from stakeholders (environmental, consumer, and employee). To enhance the quality of corporate sustainability report, the regulator may require the implementation of a sustainability report and make regulations regarding the minimum amount of disclosure and pages.

Description in English, Italic, TNR 12, Justify. Include research problem(s), objective(s), method, finding(s), and contributions. Abstract should consist of 150-400 words. Abstract is followed by at least four keywords for easier alphabetical listing.

Keywords: *board of commissioner effectiveness, corporate governance, family ownership, stakeholder pressure, sustainability report quality*

1. Introduction

Saat ini, tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility sedang marak diperbincangkan. Namun, sampai saat ini definisi tanggung jawab sosial belum jelas dan bervariasi. Dari variasi definisi yang ada, definisi tanggung jawab sosial akhir-akhir ini berfokus pada tanggung jawab perusahaan kepada pemangku kepentingannya (Spence, Coles, dan Harris, 2001; Vos, 2003; Sweeney dan Coughlan, 2008).

Pemangku kepentingan adalah seseorang, suatu kelompok, atau organisasi yang memiliki ketertarikan atau kepentingan dalam organisasi tertentu (Lamont, 2004). Tanpa adanya dukungan pemangku kepentingan, perusahaan tidak dapat menjalankan usahanya dan setiap klasifikasi industri memiliki pemangku kepentingan utama (primary stakeholder) yang berbeda (Fernandez-Feijoo, Romero, dan Ruiz, 2014; Branco dan Rodriguez, 2008). Seperti contohnya, Sweeney dan Coughlan (2008) menemukan bahwa perusahaan telekomunikasi dan perusahaan kecantikan memiliki primary stakeholder yang sama, yaitu pelanggan, atau perusahaan minyak dan otomotif memiliki primary stakeholder yang sama, yaitu lingkungan.

Tekanan yang diberikan oleh para pemangku kepentingan menuntut pelaksanaan dan pengkomunikasian kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk laporan, bukan hanya sekedar laporan tapi laporan yang berkualitas. Jenis laporan tanggung jawab sosial bermacam-macam namun laporan yang paling lengkap, komprehensif, dan merupakan jenis laporan sukarela adalah laporan keberlanjutan.

Tuntutan atas kualitas laporan keberlanjutan bukan hanya dari luar (tekanan pemangku kepentingan) namun juga dari dalam perusahaan (tata kelola perusahaan). Apabila tekanan dari pengawas perusahaan besar maka laporan yang dihasilkan akan berkualitas pula. Tekanan dari pengawas perusahaan yang besar dirasakan jika memiliki struktur tata kelola yang baik. Dalam hal ini pengawas perusahaan adalah dewan komisaris. Dewan komisaris merupakan struktur tata kelola yang wajib bagi perseroan (UU No. 40 tahun 2007). Keberadaan dewan komisaris tidak dapat menjamin kualitas laporan yang dibuat karena belum tentu dewan komisaris tersebut menjalankan perannya

dengan baik. Laporan berkualitas dapat dihasilkan oleh perusahaan dengan dewan komisaris yang efektif.

Struktur tata kelola juga tergantung pada struktur kepemilikan perusahaan. Jika perusahaan hanya dimiliki oleh satu orang, yaitu pemegang saham yang sekaligus manajer maka tidak ada masalah keagenan. Tidak adanya masalah keagenan menyebabkan perusahaan tidak perlu membuat laporan yang berfungsi sebagai alat untuk mengurangi biaya keagenan yang timbul akibat masalah keagenan. Jika perusahaan dimiliki oleh lebih dari satu orang maka terdapat masalah keagenan. Masalah tersebut berbeda-beda bobotnya tergantung pada tingkat konsentrasi kepemilikan perusahaan (Lazarides, Drimpetas, dan Dimitrios, 2009). Perusahaan dengan kepemilikan yang lebih terkonsentrasi memiliki masalah keagenan yang lebih sederhana dibandingkan dengan perusahaan dengan kepemilikan yang lebih tersebar.

Menurut Claessens, Djankov, dan Lang (2000), struktur kepemilikan perusahaan di Indonesia didominasi oleh kepemilikan keluarga. Claessens, Djankov, dan Lang (2000) menemukan bahwa sepuluh keluarga terbesar di Indonesia memiliki setengah dari aset korporasi sementara Hong Kong dan Korea hanya sepertiganya. Kepemilikan keluarga di Indonesia (71.5%) juga jauh lebih besar dibandingkan dengan negara lain yang didominasi oleh kepemilikan keluarga, seperti Korea (48.4%), Hongkong (66.7%), Malaysia (67.2%), Filipina (44.6%), Singapura (55.4%), Taiwan (48.2%), serta Thailand (61.6%).

Jika suatu perusahaan dimiliki oleh keluarga maka pemilik terbesar dan manajer perusahaan tersebut adalah bagian dari anggota keluarga. Karena itu, ada rasa saling percaya di antara mereka dan kualitas laporan tidak dipentingkan. Selain itu, menurut Juhmani (2013), pemilik terbesar dapat memanipulasi kualitas laporan untuk memaksimalkan keuntungan pribadi. Pemilik terbesar sudah mengetahui seluk beluk perusahaan sehingga laporan hanya dibuat untuk pemilik minoritas. Laporan yang berkualitas membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan, pemilik terbesar membuat laporan dengan kualitas rendah. Karena itu, perusahaan dengan kepemilikan keluarga menghasilkan laporan tanggung jawab sosial dengan kualitas lebih buruk (Ben-Ali, 2008; Khiari dan Karaa, 2013; Chau dan Gray, 2002).

Banyak penelitian yang meneliti tentang pengaruh tekanan pemangku kepentingan utama dan tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Namun, penelitian yang ada hanya menunjukkan dampaknya terhadap kuantitas pengungkapan tanggung jawab sosial, bukan kualitas. Cowen, Ferreri, dan Parker (1987), Toms (2002), serta Hasseldine, Salama, dan Toms (2005) menyatakan bahwa bergantung pada kuantitas pengungkapan saja akan memberikan kesimpulan yang salah. Untuk itu, penting untuk mengetahui apakah tekanan dari pemangku kepentingan utama, yang berbeda antar kelompok industri, dan tata kelola perusahaan, dari kualitas tata kelola dan struktur kepemilikan perusahaan, meningkatkan kualitas informasi tanggung jawab sosial secara umum dalam laporan keberlanjutan. Hal inilah yang menjadi motivasi dalam melakukan penelitian ini.

Pertanyaan dalam penelitian ini adalah: (1) apakah perusahaan yang tergabung dalam kelompok industri dengan lingkungan sebagai pemangku kepentingan utama mengungkapkan laporan keberlanjutan dengan tingkat kualitas yang lebih tinggi dari yang tidak tergabung dalam kelompok industri dengan lingkungan sebagai pemangku kepentingan utama, (2) apakah perusahaan yang tergabung dalam kelompok industri dengan konsumen akhir sebagai pemangku kepentingan utama mengungkapkan laporan keberlanjutan dengan tingkat kualitas yang lebih tinggi dari yang tidak tergabung dalam kelompok industri dengan konsumen akhir sebagai pemangku kepentingan utama, (3) apakah tekanan karyawan sebagai pemangku kepentingan utama berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keberlanjutan perusahaan, (4) apakah tekanan pemegang saham sebagai pemangku kepentingan utama berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keberlanjutan perusahaan, (5) apakah efektivitas dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keberlanjutan perusahaan. (6) apakah kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keberlanjutan perusahaan.

Tujuan penelitian ini bukan untuk memetakan pemangku kepentingan utama di setiap perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris bahwa tekanan dari pemangku kepentingan (lingkungan, konsumen akhir, karyawan, dan pemegang saham) dan tata kelola perusahaan yaitu efektivitas dewan komisaris mempengaruhi kualitas laporan keberlanjutan secara positif dan tata kelola perusahaan yaitu kepemilikan keluarga mempengaruhi kualitas laporan keberlanjutan secara negatif.

2. Theoretical Framework and Hypothesis Development

Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan terus meyakini bahwa mereka beroperasi sesuai dengan batasan dan norma masyarakat di sekitar mereka untuk memastikan bahwa apa yang mereka lakukan dianggap sah oleh masyarakat (Deegan dan Unerman, 2011). Sama dengan hubungan principal-agent dalam teori keagenan, perusahaan bertindak sebagai agen dan pemangku kepentingan sebagai prinsipal, dengan adanya kontrak sosial, selalu mengawasi aktivitas perusahaan untuk memastikan mereka bertindak sesuai dengan cara yang dapat diterima. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah salah satu cara untuk mendapatkan legitimasi perusahaan (Cheng, Ioannou, dan Serafeim, 2013). Perusahaan melakukan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan tekanan dari pemangku kepentingan untuk mendapatkan legitimasi sosial dan menghasilkan respon positif dari pemangku kepentingan (Aguilera, Rupp, Williams, dan Janapathi, 2007; Margolis dan Walsh, 2003 dalam Sweeney dan Coughlan, 2008; Wang dan Qian, 2011). Menurut teori *stakeholder*, tujuan perusahaan adalah memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan dan menyeimbangkan konflik diantara mereka (Man, 2015). Namun, dalam menyeimbangkan kebutuhan dan keinginan pemangku kepentingan, ada berbagai kendala yang dihadapi oleh perusahaan, salah satunya adalah yang disebut oleh Mitchell, Agle, dan Wood (1997) sebagai *stakeholder saliency*. *Stakeholder saliency* adalah seberapa besar tingkat kekuatan, legitimasi, dan urgensi pemangku kepentingan seorang pemangku kepentingan (Mitchell, Agle, dan Wood, 1997). Berdasarkan hal tersebut, dalam menyeimbangkan kebutuhan dan keinginan pemangku kepentingan, perusahaan harus memilah mana pemangku kepentingan yang harus diberi perhatian khusus (*primary stakeholder*) dan yang mana yang tidak (*secondary stakeholder*). Tekanan yang diberikan oleh *primary stakeholder* lebih besar daripada *secondary stakeholder* sehingga perusahaan berusaha menjalankan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan keinginan *primary stakeholder*. Hal ini juga berpengaruh pada kualitas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Dong, Fu, Gao, dan Ni, 2015). Tekanan *primary stakeholder* dan ekspektasi tanggung jawab sosial mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial (Ullman, 1985).

Menurut teori keagenan, masalah keagenan dibagi menjadi dua tipe (Jensen dan Meckling, 1976). Pada masalah keagenan tipe I, informasi asimetris timbul pada pemegang saham dan manajer. Karena

pemegang saham (prinsipal) tidak sama dengan manajer (agen) maka ada banyak informasi yang tidak diketahui oleh prinsipal. Inilah yang menimbulkan informasi asimetris pada masalah keagenan tipe I.

Pada masalah keagenan tipe II, informasi asimetris timbul pada pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Karena pemegang saham mayoritas (prinsipal I) sama dengan manajer (agen) maka tidak terdapat informasi asimetris antara pemegang saham mayoritas dan manajer. Informasi asimetris timbul pada pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Oleh karena pemegang saham mayoritas sama dengan manajer, pemegang saham mayoritas mengetahui seluk beluk perusahaan. Pemegang saham minoritas (prinsipal II) yang mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan kepada manajer (agen), tidak mengetahui banyak informasi dalam perusahaan. Masalah keagenan tipe II adalah hal yang menyebabkan kepemilikan keluarga menghasilkan laporan tanggung jawab sosial dengan kualitas yang lebih buruk.

Adanya informasi asimetris menyebabkan prinsipal (baik prinsipal I maupun prinsipal II) harus mengawasi agen dengan berbagai cara untuk meyakini bahwa agen bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal, seperti adanya dewan komisaris yang efektif. Hal inilah yang menjadikan teori keagenan sebagai kerangka teoritis utama dalam pembahasan pengaruh positif efektivitas dewan komisaris terhadap kualitas laporan tanggung jawab sosial.

Menurut ISO 26000 (2010), tanggung jawab sosial adalah tanggung jawab perusahaan (organisasi) atas keputusan dan aktivitasnya kepada masyarakat dan lingkungan melalui tindakan etis dan transparan yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, termasuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, mempertimbangkan ekspektasi pemangku kepentingan, sesuai dengan hukum dan norma perilaku yang berlaku, terintegrasi dalam perusahaan (organisasi) secara menyeluruh. Saat ini perusahaan di Indonesia membuat pengungkapan tanggung jawab sosial yang sukarela, yaitu dalam bentuk laporan keberlanjutan yang terpisah dari laporan tahunan.

Laporan keberlanjutan tidak hanya sekedar penyampaian informasi tetapi juga proses eksplorasi, konstruksi, modifikasi, dan negosiasi dengan pemangku kepentingan (Christensen dan Cheney, 2011 dalam Gomez dan Chalmeta, 2013). Karena itu, kualitas laporan keberlanjutan perusahaan sangat penting untuk memenangkan proses negosiasi dengan pemangku kepentingan. Suatu laporan dikatakan

berkualitas apabila memiliki nilai bagi pembacanya. Man (2015) mengatakan bahwa pengukuran kualitas berarti menentukan kebutuhan pengguna dan mengidentifikasi atribut dan karakteristik kualitatif dari kebutuhan tersebut.

2.1. Lingkungan sebagai Pemangku Kepentingan dan Kualitas Laporan Keberlanjutan

Menurut teori legitimasi, perusahaan yang sensitif terhadap lingkungan cenderung mengungkapkan laporan tanggung jawab sosial dengan lebih berkualitas untuk melegitimasi operasional perusahaan. Hal ini tidak luput dari tekanan dari kelompok pecinta lingkungan (seperti *Greenpeace*) dan masyarakat pada umumnya. Masyarakat dan kelompok pecinta lingkungan menuntut perusahaan untuk memperbaiki lingkungan yang telah perusahaan rusak akibat kegiatan operasionalnya. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, perusahaan berusaha melakukan tanggung jawab sosial dan mengungkapkannya dengan lebih transparan. Hal ini disebabkan karena semakin sensitif industri terhadap lingkungan, pemegang saham semakin peka terhadap informasi lingkungan, maka semakin signifikan laporan tentang lingkungan perusahaan tersebut (laporan tanggung jawab sosial) (Choi, 1999; Sulaiman, Abdullah, dan Fatima, 2014; Amran dan Devi, 2008; Nasir dan Yusoff, 2005; Gamerschlag, Moller, dan Verbeeten, 2011; Brammer dan Pavelin, 2006; Choi, 1999).

H1. *Perusahaan yang tergabung dalam kelompok industri dengan lingkungan sebagai pemangku kepentingan utama mengungkapkan laporan keberlanjutan dengan tingkat kualitas yang lebih tinggi dari perusahaan yang tidak tergabung dalam kelompok industri dengan lingkungan sebagai pemangku kepentingan utama*

2.2. Konsumen Akhir sebagai Pemangku Kepentingan dan Kualitas Laporan Keberlanjutan

Perusahaan yang memiliki kedekatan dengan konsumen akhir cenderung lebih diperhatikan konsumen. Perusahaan yang memproduksi barang yang dikonsumsi oleh konsumen akhir cenderung lebih diperhatikan daripada perusahaan yang memproduksi barang produksi (McWilliams dan Siegel, 2001). Hal ini menyebabkan perusahaan harus memperhatikan tindakannya dan beroperasi sesuai dengan keinginan konsumen. Saat ini, konsumen telah diinformasikan dengan lebih transparan

mengenai dampak produk konsumsi terhadap lingkungan sehingga mereka lebih peduli terhadap lingkungan.

Penelitian menunjukkan bahwa konsumen akhir mempengaruhi kualitas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Saka dan Noda, 2013; Branco dan Rodriguez, 2008; Gamerschlag, Moller, dan Verbeeten, 2011; Darus, Mad, dan Yusoff, 2014). Pernyataan ini juga didukung oleh beberapa penelitian yang mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan dalam industri *high-profile* (dekat dengan komunitas dan konsumen akhir) dan *low-profile* (kurang dekat dengan komunitas dan konsumen akhir) (Roberts, 1992; Branco dan Rodriguez, 2008; Faisal, Tower, dan Rusmin, 2012).

H2. *Perusahaan yang tergabung dalam kelompok industri dengan konsumen sebagai pemangku kepentingan utama mengungkapkan laporan keberlanjutan dengan tingkat kualitas yang lebih tinggi dari perusahaan yang tidak tergabung dalam kelompok industri dengan konsumen sebagai pemangku kepentingan utama*

2.3. *Karyawan sebagai Pemangku Kepentingan dan Kualitas Laporan Keberlanjutan*

Saat ini, karyawan dan calon karyawan memperhatikan apakah perusahaan tempat ia bekerja merupakan perusahaan yang bertanggung jawab sosial atau tidak. Karyawan-karyawan yang berkualitas telah mengerti akan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan. Aset paling berharga untuk perusahaan bukan lagi aset yang dapat diukur dan dapat dilihat tapi aset yang tidak dapat diukur, yaitu *intellectual capital* atau sumber daya manusia. Kehilangan karyawan berkualitas menyebabkan perusahaan dapat terguncang operasionalnya. Untuk menghindari hal tersebut, perusahaan harus melakukan tuntutan karyawan untuk melakukan dan melaporkan tanggung jawab sosial perusahaan. Sun dan Yu (2015), Huang dan Kung (2010), Betts, Wiengarten, dan Tadisina (2015), Turban dan Greening (1997), Campbell (2007) menemukan bahwa perusahaan dalam perusahaan yang bertanggung jawab sosial bekerja dengan lebih baik daripada yang bekerja di tempat yang tidak bertanggung jawab sosial.

H3. *Tekanan karyawan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keberlanjutan perusahaan*

2.4. Pemegang Saham sebagai Pemangku Kepentingan dan Kualitas Laporan Keberlanjutan

Perusahaan dengan tingkat penyebaran kepemilikan saham yang rendah cenderung memiliki laporan tanggung jawab sosial yang lebih buruk daripada perusahaan dengan tingkat penyebaran kepemilikan saham yang tinggi. Hal ini disebabkan karena perusahaan dengan tingkat penyebaran kepemilikan saham yang rendah memberikan tekanan yang lebih ringan terhadap perusahaan untuk melaporkan tanggung jawab sosialnya karena terkonsentrasinya jumlah pemegang saham dan pemegang saham yang sedikit tersebut mendapat informasi yang lebih menyeluruh. Akibatnya, asimetris informasinya sedikit dan masalah keagenannya kecil. Masalah keagenan yang kecil mengakibatkan biaya keagenan yang kecil sehingga perusahaan tidak perlu mengungkapkan laporan dengan kualitas baik untuk meminimalisir biaya keagenan. Begitu pula sebaliknya, pada perusahaan dengan tingkat penyebaran kepemilikan saham yang tinggi (Mak dan Li, 2001; Eng dan Mak, 2003; Chau dan Gray, 2002; Keim, 1978; Christopher dan Hassan, 1996 dalam Dincer, 2011; Frost, 1999). Karena itu, tekanan pemegang saham dapat meningkatkan kualitas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Choi, 1999; Liu and Anbumozhi, 2009; Roberts, 1992).

H4. *Tekanan pemegang saham berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keberlanjutan perusahaan*

2.5. Dewan Komisaris sebagai Tata Kelola Perusahaan dan Kualitas Laporan Keberlanjutan

Tugas dewan komisaris adalah mengawasi manajemen agar bertindak sesuai kepentingan pemangku kepentingannya (Huse dan Ridova, 2001 dalam Handajani, Subroto, Saraswati, dan Sutrisno, 2014). Dewan komisaris yang efektif dapat membantu perusahaan untuk memastikan bahwa manajemen berperilaku sesuai dengan keinginan pemangku kepentingan, yang merupakan basis tanggung jawab sosial perusahaan menurut *stakeholder theory*. Terkait dengan kualitas laporan tanggung jawab sosial, teori institusional menyimpulkan bahwa kehadiran dewan komisaris sebagai pengawas yang efektif dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas laporan yang disajikan.

Penelitian terdahulu menguji dampak efektivitas dewan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial, namun hasilnya tidak konsisten. Seperti contohnya Handajani, Subroto, Saraswati, dan Sutrisno

(2014) menemukan adanya pengaruh positif antara efektivitas dewan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial, namun Said, Zainuddin, dan Haron (2009) tidak menemukan pengaruh antara efektivitas dewan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial.

Ketidakkonsistenan ini menyebabkan keefektivan dewan komisaris diragukan pengaruhnya terhadap kualitas laporan tanggung jawab sosial. Padahal para peneliti sepakat bahwa dewan komisaris yang efektif mempengaruhi kualitas laporan tanggung jawab sosial. Atas dasar tersebut, hipotesis ini dibuat:

H5. *Efektivitas dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keberlanjutan perusahaan*

2.6. Kepemilikan Keluarga sebagai Tata Kelola Perusahaan dan Kualitas Laporan Keberlanjutan

Perusahaan di Indonesia didominasi oleh kepemilikan keluarga (Claessens, Djankov, dan Lang 1999). Dalam perusahaan keluarga, anggota keluarga berpartisipasi secara aktif dalam manajemen perusahaan dan bertindak sebagai direktur (Yoshikawa dan Rasheed, 2009; Ho dan Kang, 2013). Sehingga, selain menjadi pemilik, keluarga juga sebagai manajer. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan keluarga memiliki konflik agensi tipe I yang lebih sedikit namun konflik agensi tipe II yang besar, yang berarti kualitas laporan perusahaan dengan kepemilikan keluarga lebih buruk daripada tanpa kepemilikan keluarga (Ben-Ali, 2014; Ho dan Wong, 2001; Chau dan Gray, 2002; Barakat, Lopez Perez, dan Ariza, 2014; Khiari dan Karaa, 2013).

H6. *Kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keberlanjutan perusahaan*

3. Research Method

Tekanan pemangku kepentingan berdasarkan industri terdiri dari empat kelompok pemangku kepentingan yaitu lingkungan, konsumen akhir, karyawan, dan pemegang saham. Tata kelola perusahaan diukur dengan efektivitas dewan komisaris dan kepemilikan keluarga. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Model penelitian yang mencerminkan hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

$$CSRQUAL_{it} = \beta_0 + \beta_1 ESI_{it} + \beta_2 CPI_{it} + \beta_3 EOI_{it} + \beta_4 IOI_{it} + \beta_5 EFEKDEKOM_{it} + \beta_6 FAM_{it} \\ + \beta_7 SIZE_{it} + \beta_8 LEV_{it} + \beta_9 PROFIT_{it} + \varepsilon_{it}$$

CSRQUAL	= Kualitas laporan tanggung jawab sosial
ESI	= <i>Environmentally-sensitive industries</i>
CPI	= <i>Consumer-proximity industries</i>
EOI	= <i>Employee-oriented industries</i>
IOI	= <i>Investor-oriented industries</i>
EFEKDEKOM	= Efektivitas dewan komisaris
FAM	= Kepemilikan keluarga
SIZE	= Ukuran perusahaan
LEV	= Rasio total utang terhadap total ekuitas
PROFIT	= Rasio <i>Return on Equity</i>

Pengukuran kualitas laporan tanggung jawab sosial yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* berdasarkan G3 dan G4, jumlah halaman, opini atas laporan keberlanjutan perusahaan, dan penilaian pihak independen atas GRI *application check*. Pengukuran ini sesuai dengan pengukuran yang digunakan oleh Man (2015) yaitu banyaknya halaman laporan dan opini atas laporan keberlanjutan perusahaan namun mengganti *content analysis* 89 item yang dikembangkan oleh Man (2015) dengan *content analysis* berdasarkan G3 dan G4 (Dilling, 2010; Fernandez-Feijoo, Romero, dan Ruiz, 2014) serta menambah adanya penilaian pihak independen atas GRI *application check*. Pengukuran *content analysis* berdasarkan G3 dan G4 tergantung dari penggunaan masing-masing perusahaan (G3.1, 2000; G4, 2013a dan 2013b). Apabila pada tahun tertentu, suatu perusahaan masih menggunakan G3 dalam pengungkapan maka perusahaan tersebut dinilai berdasarkan standar umum dan standar khusus G3. Apabila pada tahun berikutnya, perusahaan tersebut telah menggunakan G4 dalam pengungkapan maka perusahaan tersebut dinilai berdasarkan standar umum dan standar khusus G4. Pemberian bobot pada *content analysis* didasarkan pada pengungkapannya, yaitu nilai 0 untuk komponen yang tidak diungkapkan, nilai 1 untuk komponen yang diungkapkan secara kualitatif dan nilai 2 untuk komponen yang diungkapkan secara kuantitatif. Pengukuran ini digunakan karena pengukuran ini merupakan

kombinasi dari berbagai pengukuran dalam penelitian terdahulu dan mencakup seluruh unsur karakteristik kualitatif informasi.

Pengukuran kualitas diambil dari hasil analisis faktor dari variabel persentase nilai *disclosure quantity* dengan G3 dan G4, logaritma natua dari jumlah halaman pada laporan tanggung jawab sosial dengan menggunakan laporan keberlanjutan perusahaan, ada tidaknya opini atas laporan tanggung jawab sosial, dengan menggunakan laporan keberlanjutan, dari auditor, dan ada tidaknya GRI *application check* dari pihak independen.

Pengukuran klasifikasi industri dengan lingkungan dan konsumen akhir sebagai pemangku kepentingan menggunakan pengukuran Fernandez-Feijoo, Romero, dan Ruiz (2014) yang telah disesuaikan dengan industri yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Industri yang termasuk memiliki lingkungan sebagai pemangku kepentingan adalah agrikultur, pertambangan, industri kimia, mesin, otomotif dan komponennya, kabel, properti, perumahan, dan konstruksi, industri energi, jalan tol, lapangan terbang, pelabuhan, transportasi, konstruksi non bangunan, elektronik. Industri yang termasuk sensitif terhadap lingkungan tersebut diberi nilai 1 sedangkan industri lainnya diberi nilai 0. Industri yang termasuk memiliki konsumen akhir sebagai pemangku kepentingan adalah industri barang-barang konsumsi, jasa keuangan, restoran, hotel, dan tour, barang-barang ritel, percetakan, periklanan, media, perawatan kesehatan, tekstil dan garmen, sepatu, industri energi, perusahaan investasi, telekomunikasi. Industri yang termasuk sensitif terhadap konsumen akhir tersebut diberi nilai 1 sedangkan industri lainnya diberi nilai 0.

Pengukuran klasifikasi industri dengan karyawan sebagai pemangku kepentingan menggunakan pengukuran dari Saka dan Noda (2013) yaitu jumlah karyawan. Pengukuran klasifikasi industri dengan pemegang saham sebagai pemangku kepentingan menggunakan pengukuran dari Thomsen, Pederson, dan Kvist (2006), yaitu dengan tingkat konsentrasi struktur kepemilikan. Tingkat konsentrasi diukur dengan perbandingan jumlah saham yang dimiliki oleh perusahaan induk dengan jumlah saham keseluruhan.

Efektivitas dewan komisaris diukur dengan metode skoring berdasarkan Hermawan (2009) dimana terdapat 17 pertanyaan yang dibagi menjadi empat kategori berdasarkan karakteristik dewan komisaris, yaitu independensi, aktivitas, ukuran, dan kompetensi dewan. Perhitungannya sebagai berikut:

$$EFEKDEKOM_j = \frac{\sum_{i=1}^{n_j} X_{ij}}{n_j} \dots\dots\dots 1)$$

EFEKDEKOM_j = Nilai efektivitas dewan komisaris pada tahun ke-j

N_j = nilai maksimum skoring pada tahun ke-j (yaitu 51)

X_{ij} = skor tiga untuk baik, skor dua untuk cukup, skor satu untuk buruk.

Kepemilikan keluarga menurut Arifin (2003) dalam Siregar dan Utama (2005) diukur dengan persentase kepemilikan semua individu dan perusahaan yang kepemilikannya tercatat (kepemilikan > 5% wajib dicatat), yang bukan merupakan perusahaan publik, negara, institusi keuangan dan publik (individu yang kepemilikannya tidak wajib dicatat).

Ukuran perusahaan digunakan sebagai variabel kontrol karena ukuran perusahaan telah banyak digunakan oleh peneliti sebagai variabel yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan secara positif (contoh: Guthrie dan Parker, 1989; Hackston dan Milne, 1996). Sesuai dengan Lan, Wang, dan Zhang (2013); Purwanto (2011); Gamerschlag, Moller, dan Verbeeten (2011), ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan logaritma natua total aset pada akhir tahun.

Leverage digunakan sebagai variabel kontrol karena banyak penelitian yang menunjukkan bahwa leverage adalah variabel yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial secara positif (contoh: Meek, Roberts, dan Gray, 1995). Sesuai dengan penelitian terdahulu (Murcia dan Santos, 2012), *leverage* diukur dengan menggunakan DTA (*Debt to Asset Ratio*) dengan rumus:

$$DTA = \frac{\text{Total utang}}{\text{Total aset}} \dots\dots\dots 2)$$

Pada negara berkembang, batasan secara tegas antara utang jangka pendek dan utang jangka panjang cukup sulit (Pandey, 2003). Lebih lanjut Pandey (2003) menganjurkan untuk menggunakan total utang pada penelitian di negara berkembang karena lebih mendekati realitas yang ada.

Profitabilitas digunakan sebagai variabel kontrol karena profitabilitas juga merupakan salah satu variabel yang banyak diteliti untuk dilihat pengaruh positifnya terhadap tanggung jawab sosial

perusahaan (Gamerschlag, Mollen dan Verbeeten 2010; Brammer dan Pavelin, 2006; Quick dan Knocinski, 2006 dalam Albers dan Gunther, 2011). Penelitian ini menggunakan ROE dalam mengukur profitabilitas dengan rumus:

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total Ekuitas}} \dots \dots \dots 3)$$

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode penelitian adalah lima tahun, yaitu tahun 2010-2014. Tahun 2010 dipilih karena pada tahun 2010, negara-negara anggota ISO (termasuk Indonesia) telah mensepakati dikeluarkannya ISO 26000 *Guidance on Social Responsibility* yang memberikan pedoman mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. ISO 26000 juga dikaitkan dengan laporan keberlanjutan yang diukur dengan GRI.

Penetapan sampel perusahaan berdasarkan kriteria perusahaan yang terdaftar di BEI antara tahun 2010-2014, perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan yang berdiri sendiri (*stand alone*) dengan siklus tahunan, perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan yang dapat dipisahkan antara induk dan anak perusahaan, perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan pada tahun yang sama dengan tahun laporan keberlanjutan.

Laporan keberlanjutan tersebut harus yang berdiri sendiri karena laporan keberlanjutan yang berdiri sendiri adalah laporan sukarela yang diterbitkan perusahaan. Selain itu, Cho, Michelin, dan Patten (2012) mengatakan bahwa laporan yang berdiri sendiri meningkatkan akuntabilitas perusahaan.

4. Results

Jumlah sampel yang sesuai kriteria pemilihan sampel adalah 123 observasi dengan total 37 perusahaan. Tabel 1 menunjukkan prosedur pemilihan sampel penelitian. Jenis industri perusahaan sampel disajikan dalam tabel 2. Dari tabel 2, dapat dilihat bahwa mayoritas sampel terdapat pada industri jasa finansial, yaitu sebesar 26.01%. Hal ini mengindikasikan bahwa dari seluruh industri, industri jasa finansial adalah industri yang paling banyak memiliki laporan keberlanjutan. Selain itu, industri yang paling sedikit memiliki laporan keberlanjutan adalah industri eceran (3.25%).

Tabel 1.

Prosedur Pemilihan Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah perusahaan
Perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2010-2014	2.246
Perusahaan yang tidak melaporkan laporan keberlanjutan <i>stand alone</i>	(2.106)
Perusahaan yang laporan keberlanjutannya tidak dapat diakses	(2)
Perusahaan yang melaporkan laporan keberlanjutan secara dua tahunan	(4)
Perusahaan yang melaporkan laporan keberlanjutan untuk satu grup dan tidak dapat dipisahkan	(10)
Perusahaan yang tidak ditemukan laporan tahunannya	(5)
Sampel penelitian	123

Tabel 2.

Jenis Industri Perusahaan Sampel

Industri	Jumlah	Persentase
Pertanian	9	7.32%
Konstruksi dan properti	20	16.26%
Jasa Finansial	32	26.01%
Pertambangan	23	18.70%
Infrastruktur, penggunaan sehari-hari dan transportasi	17	13.82%
Industri dasar dan kimia	13	10.57%
Otomotif	5	4.07%
Eceran	4	3.25%
Total	123	100%

Statistik deskriptif dari semua variabel disajikan dalam tabel 3. Perusahaan yang mengungkapkan laporan keberlanjutan sangat bervariasi, dari segi jumlah karyawan (*EOI*) (dari 230 orang sampai 225,580 orang) dan ukuran perusahaan yang diukur dengan menggunakan total aset (*SIZE*) (dari 2,000,000 sampai 802,000,000). Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan jumlah karyawan bukan merupakan halangan bagi suatu perusahaan dalam membuat laporan keberlanjutan.

Tabel 3.

Statistik Deskriptif Umum

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Standar Deviasi
<i>CSRQUAL</i>	123	-2.024	2.6646	0.0000	1.0000
<i>ESI</i>	123	0.00	1.00	0.6667	0.47333
<i>CPI</i>	123	0.00	1.00	0.3577	0.48129
<i>EOI</i> (orang)	123	230	225,580	18,106.2	37,914.63
<i>EOI</i> (ln)	123	5.44	12.33	8.7071	1.4631
<i>IOI</i>	123	0.0000	0.9855	0.3682	0.3756
<i>EFEKDEKOM</i>	123	0.57	0.92	0.7583	0.07575
<i>FAM</i>	123	0.00	0.97	0.1785	0.29945
<i>SIZE</i> (ln)	123	28.00	34.00	31.0976	1.35147
<i>SIZE</i> (jutaan Rp)	123	2,000,000	802,000,000	78,980,000	136,321,000
<i>LEV</i>	123	0.00	0.92	0.5697	0.23942
<i>PROFIT</i>	123	-0.53	0.43	0.1747	0.11915

CSRQUAL: Kualitas laporan keberlanjutan, *ESI*: *Environmentally-sensitive industries*, *CPI*: Consumer-proximity industries, *EOI*: *Employee-oriented industries*, *IOI*: *Investor-oriented industries*, *EFEKDEKOM*: Efektivitas dewan komisaris, *FAM*: Kepemilikan keluarga dalam suatu perusahaan, *SIZE*: Logaritma natua total aset, *LEV*: Rasio utang terhadap aset, *PROFIT*: Rasio laba bersih terhadap total ekuitas

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa 66.67% dari perusahaan yang mengungkapkan laporan keberlanjutan yang terpisah dari laporan tahunan adalah perusahaan yang sensitif terhadap lingkungan (*ESI*) sedangkan perusahaan yang memiliki kedekatan dengan pelanggan (*CPI*), fokus terhadap karyawan (*EOI*), dan fokus terhadap pemegang saham (*IOI*) adalah sebesar 35.77%, 26.02%, dan 47.15%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang sensitif terhadap lingkungan merasa perlu mengungkapkan laporan keberlanjutan untuk menunjukkan kepada publik bagaimana perusahaan tersebut telah memperbaiki lingkungan yang telah mereka gunakan dalam kegiatan operasionalnya.

Efektivitas dewan komisaris (*EFEKDEKOM*) menunjukkan angka minimum 0.57 dan nilai maksimum 0.92 dengan nilai rata-rata 0.7583. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan yang mengungkapkan laporan keberlanjutan yang terpisah dari laporan tahunan adalah perusahaan yang memiliki dewan komisaris yang efektif, yaitu 75.83% dari 100%.

Persentase kepemilikan keluarga (*FAM*) pada perusahaan yang mengungkapkan laporan keberlanjutan yang terpisah dari laporan tahunan bervariasi dari 0% sampai 97%. Akan tetapi, nilai rata-rata sebesar 17.85% menunjukkan bahwa perusahaan yang mengungkapkan laporan keberlanjutan yang terpisah dari laporan tahunan sebagian besar tidak dimiliki oleh keluarga. Selain itu, perusahaan sampel sebagian besar adalah BUMN (Badan Usaha Milik Negara).

Penjabaran statistik deskriptif untuk kualitas laporan keberlanjutan per tahun disajikan pada tabel 4. Berdasarkan analisis dari tabel 4, dapat diambil kesimpulan bahwa kualitas laporan keberlanjutan di Indonesia masih kurang baik, terlihat dari rendahnya jumlah opini atas laporan keberlanjutan dan *GRI Application Check* dari pihak independen. Sedikitnya jumlah laporan keberlanjutan dan maraknya penggunaan *GRI G4 core* menunjukkan bahwa perusahaan di Indonesia masih belum sadar akan pentingnya melaporkan keberlanjutan perusahaan kepada publik.

Dari tabel 4 dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang mengungkapkan laporan keberlanjutan memiliki dewan komisaris yang efektif, sesuai dengan hasil analisis berdasarkan pengukuran efektivitas dewan komisaris dari Hermawan (2009). Hal ini dapat dilihat dari kepatuhan perusahaan-perusahaan yang memiliki laporan keberlanjutan atas peraturan OJK mengenai proporsi dewan komisaris independen sebesar 30%, memiliki komite nominasi dan remunerasi, tidak bekerja di perusahaan

afiliasi, lama menjabat kurang dari 10 tahun, dan total rapat lebih dari enam kali dengan jumlah kehadiran lebih dari 80%.

Tabel 4.

Statistik Deskriptif Laporan Keberlanjutan per Tahun

Tahun	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah	19	22	24	32	26
<i>DISCG3</i>	120.05	130.91	146.74	127.44	
<i>%DISCG3</i>	0.49	0.53	0.60	0.52	
<i>DISCG4</i>			124	126.57	120.88
<i>%DISCG4</i>			0.42	0.43	0.41
<i>PAGE</i>	95.63	104.05	112.54	120.34	129.47
<i>PAGE (ln)</i>	4.50	4.58	4.68	4.74	4.80
<i>ASS</i>	0.11	0.09	0.17	0.13	0.23
<i>CHECK</i>	0.32	0.36	0.33	0.06	0.3
<i>DISCG3: Nilai disclosure quantity G3, DISCG4: Nilai disclosure quantity G4, PAGE: Jumlah halaman pada laporan keberlanjutan, ASS: opini atas laporan keberlanjutan, CHECK: GRI application check dari pihak independen</i>					

Hasil analisis faktor ditunjukkan dengan tabel 5. Dari angka *extraction sums of squared loadings* yang lebih dari 1, dapat diambil kesimpulan bahwa keempat variabel tersebut dapat dijadikan menjadi satu variabel yaitu kualitas laporan keberlanjutan.

Tabel 5.

Hasil Analisis Faktor

*signifikan 0,05 (*one tail*) **signifikan 0,1 (*one tail*)

4.1. Lingkungan sebagai Pemangku Kepentingan dan Kualitas Laporan Tanggung Jawab Sosial

Dari tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai signifikan *one-tail* tekanan pemangku kepentingan lingkungan sebesar 0.023. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang tergabung dalam kelompok industri dengan lingkungan sebagai pemangku kepentingan utama mengungkapkan laporan keberlanjutan dengan tingkat kualitas yang lebih tinggi dari yang tidak tergabung dalam kelompok industri dengan lingkungan sebagai pemangku kepentingan utama. Dengan demikian H_{a1} diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang sensitif terhadap lingkungan memiliki kualitas laporan keberlanjutan yang lebih tinggi daripada perusahaan yang tidak sensitif terhadap lingkungan. Hasil penelitian ini mendukung Fernandez-Feijoo, Romero, dan Ruiz (2014), Sulaiman, Abdullah, dan Fatima (2014), Amran dan Devi (2008), Nasir dan Yusoff (2005), Gamerschlag, Moller, dan Verbeeten (2011) yang menyatakan bahwa perusahaan yang sensitif terhadap lingkungan memiliki kualitas laporan keberlanjutan yang lebih tinggi daripada perusahaan yang tidak sensitif terhadap lingkungan. Hasil ini mengindikasikan bahwa masyarakat Indonesia memperhatikan keadaan lingkungan dan dampak operasional perusahaan terhadap lingkungan.

4.2. Konsumen Akhir sebagai Pemangku Kepentingan dan Kualitas Laporan Tanggung Jawab Sosial

Tabel 6 menunjukkan bahwa perusahaan yang tergabung dalam kelompok industri dengan konsumen sebagai pemangku kepentingan utama mengungkapkan laporan keberlanjutan dengan tingkat kualitas yang lebih tinggi dari yang tidak tergabung dalam kelompok industri dengan lingkungan sebagai pemangku kepentingan utama, dapat dilihat bahwa nilai signifikan *one-tail* tekanan pemangku kepentingan konsumen (*CPI*) adalah sebesar 0.038 dengan tingkat signifikansi 5%. Dengan demikian H_{a2} diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang mendapat tekanan dari konsumen akhir memiliki kualitas laporan keberlanjutan yang lebih tinggi daripada perusahaan yang tidak mendapat tekanan dari konsumen akhir.

Hasil penelitian ini mendukung pernyataan Fernandez-Feijoo, Romero, dan Ruiz (2014), Saka dan Noda (2013), Branco dan Rodriguez (2008), Gamerschlag, Moller, dan Verbeeten (2011), Darus, Mad, dan Yusoff (2014) yang menyatakan bahwa perusahaan yang mendapat tekanan dari konsumen akhir memiliki kualitas laporan keberlanjutan yang lebih tinggi daripada perusahaan yang tidak mendapat tekanan dari konsumen akhir. Artinya, konsumen di Indonesia memperhatikan produk yang dikonsumsi, apakah produk tersebut terbuat dari bahan-bahan yang ramah lingkungan, tidak menggunakan pekerja paksa, dan pertimbangan keberlanjutan lainnya.

4.3. Karyawan sebagai Pemangku Kepentingan dan Kualitas Laporan Tanggung Jawab Sosial

Tabel 6 menunjukkan bahwa karyawan mempengaruhi kualitas laporan keberlanjutan secara negatif, dilihat dari nilai signifikan *one-tail* sebesar 0.042. Karena hipotesis menunjukkan arah sebaliknya, yaitu karyawan mempengaruhi kualitas laporan keberlanjutan secara positif, dengan demikian H_{a3} ditolak. Hasil penelitian ini tidak mendukung pernyataan Fernandez-Feijoo, Romero, dan Ruiz (2014), Huang dan Kung (2010), Betts, Wiengarten, dan Tadisina (2015), Turban dan Greening (1997), Campbell (2007) yang mendefinisikan karyawan sebagai pemangku kepentingan internal yang mempengaruhi pengungkapan laporan tanggung jawab sosial secara positif.

Karyawan di Indonesia cenderung melihat tanggung jawab sosial dan laporan keberlanjutan sebagai sesuatu yang merugikan perusahaan dan mengurangi nilai perusahaan. Hal ini sesuai dengan Ceil (2012) yang menyatakan bahwa karyawan cenderung menganggap tanggung jawab sosial dapat menambah beban perusahaan sehingga dapat mengurangi gaji mereka. Selain itu tanggung jawab sosial juga membuat karyawan merasa tersisih karena praktik tanggung jawab sosial perusahaan tidak disosialisasikan dengan baik. Walaupun pengungkapan jumlah dan tingkat perekrutan karyawan baru dan perputaran karyawan menjadi komponen yang paling banyak diungkapkan (92%) dalam laporan yang menggunakan GRI G4 namun pengungkapan itu tidak ditujukan kepada karyawan sebagai pembaca laporan keberlanjutan tapi kepada pihak lain.

4.4. Pemegang Saham sebagai Pemangku Kepentingan dan Kualitas Laporan Tanggung Jawab Sosial

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemegang saham tidak mempengaruhi kualitas laporan keberlanjutan secara negatif, dengan nilai signifikan *one-tail* 0.191. Dengan demikian H_{a4} ditolak. Hasil penelitian ini tidak mendukung pernyataan Fernandez-Feijoo, Romero, dan Ruiz (2014), Mak dan Li (2001), Eng dan Mak (2003), Chau dan Gray (2002), Keim (1978), Christopher dan Hassan (1996) dalam Dincer (2011), Frost (1999) yang mengungkapkan bahwa tekanan pemegang saham mempengaruhi laporan tanggung jawab sosial perusahaan secara positif. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Mukti (2013) yang menemukan bahwa pemegang saham tidak bereaksi terhadap pengumuman tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemegang saham di Indonesia tidak memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dalam menentukan perusahaan mana yang diinvestasikan. Pemegang saham masih belum mengerti konsep tanggung jawab sosial dan dampaknya terhadap perusahaan sehingga tidak ditemukan adanya pengaruh signifikan antara tekanan pemegang saham dengan kualitas laporan keberlanjutan perusahaan.

4.5. Dewan Komisaris sebagai Tata Kelola Perusahaan dan Kualitas Laporan Tanggung Jawab Sosial

Tabel 6 menunjukkan bahwa efektivitas dewan komisaris (*EFEKDEKOM*) mempengaruhi kualitas laporan keberlanjutan secara positif, dengan nilai signifikan *one-tail* 0.006. Dengan demikian H_{a5} diterima. Hasil penelitian ini didukung oleh Das, Dixon dan Michael (2015) dan Hossain dan Reaz (2007) menemukan bahwa independensi dewan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, serta Kruger (2010) yang menemukan bahwa pergantian dewan berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

4.6. Kepemilikan Keluarga sebagai Tata Kelola Perusahaan dan Kualitas Laporan Tanggung Jawab Sosial

Kepemilikan keluarga (*FAM*) tidak mempengaruhi kualitas laporan tanggung jawab sosial perusahaan secara negatif, dengan nilai signifikan *one-tail* 0.238. Dengan demikian H_{a6} ditolak. Hasil penelitian ini tidak didukung oleh Ho dan Wong (2001), Chau dan Gray (2002), Barakat, Lopez Perez, dan Ariza (2014), Khiari dan Karaa (2013) yang mengatakan bahwa kualitas laporan yang buruk

dimiliki oleh perusahaan yang dikontrol oleh keluarga. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa tidak terdapat perbedaan kualitas laporan keberlanjutan antara perusahaan dengan kepemilikan keluarga di Indonesia dengan perusahaan tanpa kepemilikan keluarga. Hasil penelitian ini disebabkan karena sampel yang diambil dalam penelitian ini menunjukkan rata-rata angka kepemilikan keluarga yang sangat kecil, yaitu hanya 17.85%. Dalam hal ini, bukan berarti perusahaan dengan kepemilikan keluarga memiliki persamaan kualitas laporan keberlanjutan dengan perusahaan lainnya. Sebagian besar perusahaan dengan kepemilikan keluarga bahkan tidak membuat laporan keberlanjutan sehingga tidak dapat diukur kualitas laporannya.

Variabel kontrol, yaitu ukuran perusahaan (*SIZE*), *leverage* (*LEV*) dan profitabilitas (*PROFIT*) mempengaruhi kualitas laporan keberlanjutan. Variabel ukuran perusahaan (*SIZE*) mempengaruhi kualitas laporan keberlanjutan secara positif. Variabel *leverage* (*LEV*) mempengaruhi kualitas laporan keberlanjutan secara negatif. Variabel profitabilitas (*PROFIT*) mempengaruhi kualitas laporan keberlanjutan.

5. Conclusion, Implication and Limitation (TNR 12, Bold, Capitalize Each Word)

5.1 Conclusion

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan yang tergabung dalam kelompok industri dengan lingkungan sebagai pemangku kepentingan utama mengungkapkan laporan keberlanjutan dengan tingkat kualitas yang lebih tinggi dari yang tidak tergabung dalam kelompok industri dengan lingkungan sebagai pemangku kepentingan utama (Fernandez-Feijoo, Romero, dan Ruiz, 2014; Sulaiman, Abdullah, dan Fatima, 2014; Amran dan Devi, 2008; Nasir dan Yusoff, 2005; Gamerschlag, Moller, dan Verbeeten, 2011). Perusahaan yang tergabung dalam kelompok industri dengan konsumen sebagai pemangku kepentingan utama mengungkapkan laporan keberlanjutan dengan tingkat kualitas yang lebih tinggi dari yang tidak tergabung dalam kelompok industri dengan lingkungan sebagai pemangku kepentingan utama (Fernandez-Feijoo, Romero, dan Ruiz, 2014; Saka dan Noda, 2013; Branco dan Rodriguez, 2008;

Gamerschlag, Moller, dan Verbeeten, 2011; Darus, Mad, dan Yusoff, 2014) Tekanan karyawan mempengaruhi kualitas laporan keberlanjutan perusahaan secara negatif. Hasil penelitian ini tidak mendukung pernyataan Fernandez-Feijoo, Romero, dan Ruiz (2014), Huang dan Kung (2010), Betts, Wiengarten, dan Tadisina (2015), Turban dan Greening (1997), Campbell (2007) yang mendefinisikan karyawan sebagai pemangku kepentingan internal yang mempengaruhi pengungkapan laporan tanggung jawab sosial secara positif. Tekanan pemegang saham tidak mempengaruhi kualitas laporan keberlanjutan perusahaan (Mukti, 2013). Efektivitas dewan komisaris berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keberlanjutan perusahaan (Das, Dixon dan Michael, 2015; Hossain dan Reaz, 2007; Kruger, 2010) Kepemilikan keluarga tidak mempengaruhi kualitas laporan keberlanjutan perusahaan. Hasil penelitian ini tidak didukung oleh Ho dan Wong (2001), Chau dan Gray (2002), Barakat, Lopez Perez, dan Ariza (2014), Khiari dan Karaa (2013) yang mengatakan bahwa kualitas laporan yang buruk dimiliki oleh perusahaan yang dikontrol oleh keluarga.

5.2 Implication

Dari hasil penelitian diketahui bahwa jumlah karyawan berpengaruh negatif terhadap laporan keberlanjutan perusahaan. Padahal perputaran karyawan adalah item yang paling banyak diungkapkan dalam laporan keberlanjutan versi GRI G4. Seharusnya, perusahaan lebih banyak mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan dan produk karena hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang sensitif terhadap lingkungan memiliki kualitas laporan keberlanjutan yang lebih baik daripada perusahaan lainnya dan perusahaan yang dekat dengan konsumen akhir memiliki kualitas laporan keberlanjutan yang lebih baik daripada perusahaan lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas dewan komisaris mempengaruhi kualitas laporan keberlanjutan perusahaan secara positif. Karena itu, regulator diharapkan dapat memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan mengenai dewan komisaris, misalnya masih ditemukan adanya perusahaan yang memiliki proporsi dewan komisaris independen di bawah 30% (1 perusahaan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kualitas laporan keberlanjutan disebabkan karena perbedaan tekanan dari pemangku kepentingan (lingkungan, konsumen, dan karyawan). Untuk

memastikan bahwa kualitas semua laporan keberlanjutan perusahaan baik, regulator dapat mewajibkan pelaksanaan laporan keberlanjutan dan membuat peraturan mengenai batas minimum jumlah pengungkapan dan halaman.

5.3 Limitation

Penelitian ini hanya menggunakan empat pemangku kepentingan, yaitu lingkungan, konsumen, karyawan, dan pemegang saham. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pemangku kepentingan lain, seperti pemerintah (yang diukur dengan ada tidaknya kepemilikan pemerintah dalam perusahaan seperti pada Lu dan Abeysekera (2014)) dan auditor (yang diukur dengan apakah perusahaan menggunakan auditor big four atau bukan seperti pada Lu dan Abeysekera (2014)) agar dapat lebih menggambarkan pengaruh pemangku kepentingan terhadap kualitas laporan keberlanjutan. Penelitian ini hanya menggunakan dua pengukuran tata kelola perusahaan, yaitu efektivitas dewan komisaris dan kepemilikan keluarga. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pengukuran lain, seperti jenis kelamin dewan komisaris.

Penelitian ini menggunakan pengungkapan GRI, jumlah halaman, ada tidaknya assurance, dan ada tidaknya GRI Application Check dari pihak independen. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pengukuran lain untuk mengukur kualitas laporan tanggung jawab sosial perusahaan seperti metode skoring yang dibuat oleh berbagai peneliti (contoh: Abd-Mutalib, Jamil, dan Wan-Hussin, 2014; Habek dan Wolniak, 2015; Daub, 2007; Gunawan, Djajadikerta, dan Smith, 2009).

Reference

- Abd-Mutalib, H., Muhammad Jamil, C. Z., dan Wan-Hussin, W. N. (2014). The Availability, Extent dan Quality of Sustainability Reporting by Malaysian Listed Firms: Subsequent to Mandatory Disclosure. *Asian Journal of Finance dan Accounting*, 6(2), 239-257.
- Aguilera, R. V., Rupp, D. E., Williams, C., dan Ganapathi, J. (2007). Putting the S Back in Corporate Social Responsibility: a Multilevel Theory of Social Change in Organizations. *Academy of Management Review*, 32(3), 836-863.
- Albers, C., dan Günther, T. (2011). Disclose or not Disclose: Determinants of Social Reporting for STOXX Europe 600 Firms. *Z Plan Unternehmenssteuerung* 21, 323-347.
- Amran, A., dan Devi, S. S. (2008). The Impact of Government and Foreign Affiliate Influence on Corporate Social Reporting. *Managerial Auditing Journal*, 23(4), 386 - 404.

- Barakat, F. S., López Pérez, M. V., dan Rodríguez Ariza, L. (2014). Corporate social Responsibility Disclosure (CSR) Determinants of Listed Companies in Palestine (PXE) and Jordan (ASE). *Review of Managerial Science* 01, 1-22.
- Ben-Ali, C. (2014). Corporate Governance, Principal-Principal Agency Conflicts, and Disclosure. *The Journal of Applied Business Research*, 30(2), 419-432.
- Betts, T. K., Wiengarten, F., dan Tadisina, S. K. (2015). Exploring the Impact of Stakeholder Pressure on Environmental Management Strategies at the Plant Level: What does industry have to do with it? *Journal of Cleaner Production* 92, 282-294.
- Brammer, S., dan Pavelin, S. (2006). Voluntary Environmental Disclosures by Large UK Companies. *Journal of Business Finance dan Accounting*, 33(7/8), 1168-1188.
- Branco, M. C., dan Rodriguez, L. L. (2008). Factors Influencing Social Responsibility Disclosure by Portuguese Companies. *Journal of Business Ethics* 83, 685-701.
- Campbell, J. L. (2007). Why Would Corporations Behave in Socially Responsible Ways? An Institutional Theory of Corporate Social Responsibility. *The Academy of Management Review*, 32(3), 946-967.
- Ceil, C. (2012). *Employees dan Corporate Social Responsibility*. Tampa: University of Tampa. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2112654>
- Chau, G., dan Gray, S. (2002). Ownership structure and corporate voluntary disclosure in Hong Kong dan Singapore. *The International Journal of Accounting* 37, 247 – 265.
- Cheng, B., Ioannou, I., dan Serafeim, G. (2013). Corporate Social Responsibility and Access to Finance. *Forthcoming: Strategic Management Journal*. Retrieved from <http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:9887635>
- Cho, C. H., Michelon, G., dan Patten, D. M. (2012). Enhancement and obfuscation through the use of graphs in sustainability reports: An international comparison. *Sustainability Accounting, Management dan Policy Journal*, 3(1), 74-88.
- Choi, J. (1999). An Investigation of the Initial Voluntary Environment Disclosure Made in Korean Semi – annual Financial Reports. *Pacific Accounting Review*, 11(1), 73 –102.
- Claessens, S., Djankov, S., dan Lang, L. H. (2000). The Separation of Ownership and Control in East Asian Corporations. *Journal of Financial Economics* 58, 81}112.
- Cole, M. A., Elliott, R. J., dan Shimamoto, K. (2006). Globalization, Firm-Level Characteristics and Environmental Management: A Study of Japan. *Ecological Economics* 59, 312-323.
- Darus, F., Mad, S., dan Yusoff, H. (2014). The Importance of Ownership Monitoring dan Firm Resources on Corporate Social Responsibility (CSR) of Financial Institutions. *Procedia - Social dan Behavioral Sciences* 145, 173 – 180.
- Das, S., Dixon, R., dan Michael, A. (2015). Corporate Social Responsibility Reporting: A Longitudinal Study of Listed Banking Companies in Bangladesh. *World Review of Business Research*, 5(1), 130-154.
- Daub, C.-H. (2007). Assessing the Quality of Sustainability Reporting: an Alternative Methodological Approach. *Journal of Cleaner Production* 15, 75-85.
- Deegan, C., dan Unerman, J. (2011). Unregulated corporate reporting decisions: considerations of systems-oriented theories. In *Financial accounting theory (2nd European ed.)*. London: McGraw-Hill.
- Dilling, P. F. (2010). Sustainability Reporting in a Global Context: What are the Characteristics of Corporations that Provide High Quality Sustainability Reports-an Empirical Analysis. *The International Business dan Economics Research Journal*, 9(1), 19-30.
- Dincer, B. (2011). Do the Shareholders Really Care about Corporate Social Responsibility? *International Journal of Business dan Social Science*, 2(10), 71-76.
- Dong, Y., Fu, R., Gao, F., dan Ni, C. (2015). Determinants and Economic Consequences of Nonfinancial Disclosure Quality. *Forthcoming, European Accounting Review*. Retrieved from <http://ssrn.com/abstract=2555416>
- Eng, L., dan Mak, Y. T. (2003). Corporate Governance and Voluntary Disclosure. *Journal of Accounting dan Public Policy* 22, 325-345.
- Faisal, F., Tower, G., dan Rusmin, R. (2012). Legitimising Corporate Sustainability Reporting Throughout the World. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 6(2), 19-34. Retrieved from <http://ro.uow.edu.au/aabfj/vol6/iss2/3>
- Fernandez-Feijoo, B., Romero, S., dan Ruiz, S. (2014). Effect of Stakeholders' Pressure on Transparency of Sustainability Reports within the GRI Framework. *Journal of Business Ethics* 122, 53-63.
- Francis, J., Nanda, D., dan Olsson, P. (2008). Voluntary Disclosure, Earnings Quality, and Cost of Capital. *Journal of Accounting Research* 46(1), 53-99.

- Frost, G. (1999). *Environmental Reporting, an Analysis of Company Annual Reports of the Australian Extractive Industries 1985–1994*. Armidale: Doctoral Thesis, University of New England. Retrieved from <https://e-publications.une.edu.au/vital/access/manager/Repository/une:13027>
- G3.1 Sustainability Reporting Guidelines. (2000). Global Reporting Initiative.
- G4 Sustainability Reporting Guidelines: Implementation Manual. (2013a). Global Reporting Initiative.
- G4 Sustainability Reporting Guidelines: Reporting Principles dan Standard Disclosures. (2013b). Global Reporting Initiative.
- Gamerschlag, R., Moßler, K., dan Verbeeten, F. (2011). Determinants of Voluntary CSR Disclosure: Empirical Evidence from Germany. *Review of Managerial Science* 5, 233–262.
- Gomez, L. M., dan Chalmers, R. (2013). The Importance of Corporate Social Responsibility Communication in the Age of Social Media. *16th International Public Relations Research Conference*. Miami.
- Graves, S. B., dan Waddock, S. A. (1994). Institutional Owners and Corporate Social Performance. *The Academy of Management Journal*, 37(4), 1034–1046.
- Gunawan, J., Djajadikerta, H., dan Smith, M. (2009). An Examination of Corporate Social Disclosure in the Annual Reports of Indonesian Listed Companies. *Journal of the Asia-Pacific Center for Environmental Accountability*, 15(1), 13–36.
- Guthrie, J., dan Parker, L. D. (1989). Organizational social reporting: A rebuttal of legitimacy theory. *Accounting dan Business Research*, 19 (76), 343–352.
- Habek, P., dan Wolniak, R. (2015). Assessing the Quality of Corporate Social Responsibility Reports: the Case of Reporting Practices in Selected European Union Member States. *Quality and Quantity*. Retrieved from <http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11135-014-0155-z>
- Hackston, D., dan Milne, M. (1996). Some Determinants of Social and Environmental Disclosures in New Zealand Companies. *Accounting, Auditing and Accountability*, 9(1), 77–108.
- Hagerman, R., dan Zmijewski, M. (1979). Some Economic Determinants of Accounting Policy Choice. *Journal of Accounting dan Economics* 1, 142–161.
- Handajani, L., Subroto, B., Saraswati, E., dan Sutrisno, T (2014). Does Board Diversity Matter on Corporate Social Disclosure? An Indonesian Evidence. *Journal of Economics dan Sustainable Development*, 5(9), 8–16.
- Hermawan, A. (2009). *Pengaruh Efektifitas Dewan Komisaris dan Komite Audit, Kepemilikan oleh Keluarga, dan Peran Monitoring Bank terhadap Kandangan Informasi Laba*. Depok: Disertasi S3 Program Ilmu Akuntansi. Universitas Indonesia.
- Hermawan, M. S., dan Mulyawan, S. G. (2014). Profitability and Corporate Social Responsibility: an Analysis of Indonesia's Listed Company. *Asia Pacific Journal of Accounting dan Finance*, 3(1), 15–31.
- Ho, J. L., dan Kang, F. (2013). Auditor Choice and Audit Fees in Family Firms: Evidence from the SdanP 1500. *Auditing: A Journal of Practice dan Theory*, 32(4), 71–93. Retrieved from <http://ssrn.com/abstract=2458259>
- Ho, S. S., dan Wong, K. S. (2002). A Study of Corporate Disclosure Practice and Effectiveness in Hong Kong. *Journal of International Financial Management and Accounting*, 12(1), 75 - 102.
- Hossain, M., dan Reaz, M. (2007). The Determinants and Characteristics of Voluntary Disclosure by Indian Banking Companies. *Corporate Social Responsibility dan Environmental Management*, 14(5), 274–288.
- Huang, C.-L., dan Kung, F.-H. (2010). Drivers Of Environmental Disclosure and Stakeholder Expectation: Evidence from Taiwan. *Journal of Business Ethics* 96, 435–451.
- ISO 26000 (2010). *Guidance on Social Responsibility*.
- Jensen, M. C., dan Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Jo, H., Song, M. H., dan Tsang, A. (2015). Corporate Social Responsibility and Stakeholder Governance around the World. *Global Finance Journal*, 4.
- Jones, T. M. (1995). Instrumental Stakeholder Theory: A Synthesis of Ethics and Economics. *The Academy of Management Review*, 20(2), 404–437.
- Juhmani, O. (2013). Ownership Structure and Corporate Voluntary Disclosure: Evidence from Bahrain. *International Journal of Accounting dan Financial Reporting*, 3(2), 133–148.
- Kariuki, M. (2012). *The Impact of Corporate Social Responsibility Programmes on Organisations and Communities: a Case Study of Microsoft and Digital Data Divide in Nairobi, Kenya*. Nairobi: Catholic University Of Eastern Africa.
- Keim, G. D. (1978). Corporate Social Responsibility: An Assessment of the Enlightened Self-Interest Model. *The Academy of Management Review*, 3(1), 32–39. Retrieved from <http://remote-lib.ui.ac.id:2059/stable/pdf/257574.pdf>

- Khiari, W., dan Karaa, A. (2013). Corporate Governance and Disclosure Quality: Taxonomy of Tunisian Listed Firms Using the Decision Tree Method based Approach. *Journal of Applied Economics dan Business Research*, 3(2), 95-117.
- Kruger, P. (2010). *Corporate Social Responsibility and the Board of Directors*. Toulouse: Working Paper. Toulouse School of Economics, . Retrieved from www.sfgeneva.org/doc/110317_kruegerCsrdanBoard.pdf.
- Lamont, B. T. (2004). Reviewed Work: Redefining the Corporation: Stakeholder Management and Organizational Wealth by James E. Post, Lee E. Preston, Sybille Sachs. *Administrative Science Quarterly*, 49(1), 145-147.
- Lan, Y., Wang, L., dan Zhang, X. (2013). Determinants and Features of Voluntary Disclosure in the Chinese Stock Market. *China Journal of Accounting Research* 6, 265–285.
- Lu, Y., dan Abeysekera, I. (2014). Stakeholders Power, Corporate Characteristics dan Social dan Environmental Disclosure: Evidence from China. *Journal of Cleaner Production*, 64(1), 426–436.
- Lydenberg, S., Rogers, J., dan Wood, D. (2010). *From Transparency to Performance: Industry-Based Sustainability Reporting on Key Issues*. Cambridge: The Hauser Center for Nonprofit Organizations, Harvard University.
- Mak, Y., dan Li, Y. (2001). Determinants of Corporate Ownership and Board Structure: Evidence from Singapore. *Journal of Corporate Finance* 7, 235–256.
- Man, C. K. (2015). *International Perspectives: The impact of Corporate Sustainability Disclosure Decision, Disclosure Quality, Disclosure Quantity, Disclosure Index on Financial Analyst Following, Forecast Accuracy dan Forecast Dispersion*. Aberdeen: Doctoral Dissertation. University of Aberdeen.
- McWilliams, A., dan Siegel, D. (2001). Corporate Social Responsibility: A theory of the Firm Perspective. *Academy of Management Review*, 26(1), 117–128.
- Meek, G. K., Roberts, C. B., dan Gray, S. J. (1995). Factors Influencing Voluntary Annual Report Disclosures by U.S., U.K. and Continental European Multinational Corporations. *Journal of International Business Studies*, 26(3), 555-572.
- Mitchell, R. K., Agle, B. R., dan Wood, D. J. (1997). Toward a Theory of Stakeholder Identification and Saliency: Defining the Principle of Who and What Really Counts. *The Academy of Management Review*, 22(4), 853-886.
- Mukti, B. T. (2013). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Kinerja Lingkungan dan Pengungkapan Lingkungan Perusahaan terhadap Reaksi Pasar. *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi*, 4(1).
- Murcia, F.D.R, dan De Souza, F.C (2009). Discretionary-Based Disclosure: The Case of Social and Environmental Reporting. *Journal of Education and Research in Accounting* 3(2), 72.
- Nasir, N., dan Yusoff, H. (2005). Influence factors of Corporate Environmental Disclosures. A Malaysian story. *6 th Annual Conference Asian Academy Accounting Association*. Kuala Lumpur.
- Orlitzky, M. (2008). Corporate Social Performance and Financial Performance: A Research Synthesis. In A. Crane, A. McWilliams, D. Matten, J. Moon, and D. S. Siegel, *The Oxford Handbook of CSR*. Oxford: The Oxford Handbook of CSR.
- Pandey, I. (2003). Capital Structure and Market Power Interaction: Evidence from Malaysia. Retrieved from http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=322700
- Purwanto, A. (2011). Pengaruh Tipe Industri, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas Terhadap Corporate Social Responsibility. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 8(2), 110-125.
- Roberts, R. W. (1992). Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure: an Application of Stakeholder Theory. *Accounting Organizations dan Society*, 17(6), 595-612.
- Said, R., Zainuddin, Y., dan Haron, H. (2009). The Relationship between Corporate Social Responsibility Disclosure and Corporate Governance Characteristics in Malaysian Public Listed Companies. *Social Responsibility Journal*, 5(2), 212-226.
- Saka, C., dan Noda, A. (2013). The Effects of Stakeholders on CSR Disclosure: Evidence from Japan. *7th Asia Pacific Interdisciplinary Research in Accounting Conference*. Kobe. Retrieved from <http://ssrn.com/abstract=2239469>
- Siregar, S. V., dan Utama, S. (2005). Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Praktek Corporate Governance terhadap Pengelolaan Laba (Earnings Management) . *Simposium Nasional Akuntansi VIII*, (pp. 475-490). Solo.
- Spence, L., Coles, A., dan Harris, L. (2001). The Forgotten Stakeholder? Ethics and Social Responsibility in Relation to Competitors. *Business and Society Review*, 106(4), 331–352.
- Sulaiman, M., Abdullah, N., dan Fatima, A. (2014). Determinants of Environmental Reporting Quality in Malaysia. *International Journal of Economics, Management dan Accounting*, 22(1), 63-90.
- Sun, L., dan Yu, T. (2015). The Impact Of Corporate Social Responsibility on Employee Performance and Cost. *Review of Accounting and Finance*, 14 (3), 262 - 284.

- Sweeney, L., dan Coughlan, J. (2008). Do Different Industries Report Corporate Social Responsibility Differently? An Investigation through the Lens of Stakeholder Theory. *Journal of Marketing Communications*, 14(2), 113-124.
- Thomsen, S., Pedersen, T., dan Kvist, H. K. (2006). *Blockholder Ownership: Effects on Firm Value in Market and Control Based Governance Systems*.
- Turban, D. B., dan Greening, D. W. (1997). Corporate Social Performance and Organizational Attractiveness to Prospective Employees. *The Academy of Management Journal*, 40(3), 658-672.
- Ullman, A. A. (1985). Data in Search of a Theory: A Critical Examination of the Relationships among Social Performance, Social Disclosure, and Economic Performance of U. S. Firms. *The Academy of Management Review*, 10(3), 540-557. Retrieved from <http://remote-lib.ui.ac.id:2059/stable/258135>
- Vos, J. (2003). Corporate Social Responsibility and the Identification of Stakeholders. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 10(3), 141-152.
- Waddock, S. A., dan Graves, S. B. (1997). The Corporate Social Performance- Financial Performance Link. *Strategic Management Journal*, 18(4), 303-319. Retrieved from www.davideacrowther.com/csrmodule/csreading5b.pdf
- Wang, H., dan Qian, C. (2011). Corporate Philanthropy and Corporate Financial Performance :The Roles of Stakeholder Response and Political Access. *Academy of Management Journal*, 54, 1159-1181.
- Wang, J., Song, L., dan Yao, S. (2013). The Determinants Of Corporate Social Responsibility Disclosure: Evidence From China. *The Journal of Applied Business Research*, 29(6), 1833-1848.
- Yoshikawa, T., dan Rasheed, A. A. (2010). Family Control and Ownership Monitoring in Family-Controlled Firms in Japan. *Journal of Management Studies*, 47(2), 274-295.

Appendix

Daftar Pertanyaan Efektivitas Dewan Komisaris

Pertanyaan
<p>Independensi:</p> <ul style="list-style-type: none">• Jumlah proporsi komisaris independen.• Apakah komisaris utama merupakan komisaris independen.• Definisi 'independensi'• Jumlah proporsi anggota dewan komisaris yang bekerja pada perusahaan afiliasi• Perusahaan memiliki komite nominasi dan remunerasi• Lama menjabat sebagai dewan komisaris di perusahaan yang bersangkutan• Pernyataan tanggung jawab komisaris• Jumlah rapat dalam satu tahun• Jumlah tingkat kehadiran dalam satu tahun• Pernyataan evaluasi atas laporan keuangan• Evaluasi tahunan atas kinerja manajemen (BOD).• Penilaian atas prospek bisnis yang disiapkan oleh manajemen (BOD)
<p>Ukuran Dewan Komisaris:</p> <ul style="list-style-type: none">• Jumlah anggota dewan komisaris
<p>Keahlian dan Kompetensi:</p> <ul style="list-style-type: none">• Jumlah proporsi anggota dewan komisaris yang memiliki kompetensi dan pengetahuan di bidang keuangan dan akuntansi• Jumlah proporsi anggota dewan komisaris yang memiliki pengalaman dalam dunia bisnis• Jumlah proporsi anggota dewan komisaris yang memiliki pengetahuan dalam bisnis perusahaan• Rata-rata usia dewan komisaris